ABDIFEST
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Vol. 1, No. 2 Oktober 2026
E-ISSN: 3090-2738

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN WISATA EDUKASI BUDIDAYA LELE BUMDES MAMA DESA PEDAGANGAN

Alip Toto Handoko[1], Sarja[2], Agus Prasetyono[3]

[1,2] Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bakti Negara Tegal
[3] Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

e-mail korespondensi: aliptotohandoko@gmail.com

DOI: 10.24905/abdifest.v1i2.14

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel. BUMDes MAMA Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, mengelola unit usaha Wisata Edukasi Budidaya Lele yang memperoleh dukungan alokasi bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) SCTV-Indosiar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi pengelola dalam pengelolaan keuangan unit usaha tersebut. Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif yang meliputi observasi dan koordinasi, diskusi serta pencatatan keuangan sederhana bersama pengurus, kunjungan monitoring ke lokasi budidaya, dan dokumentasi kegiatan. Kegiatan ini memberikan landasan bagi pengurus untuk menerapkan pemisahan keuangan, pencatatan transaksi, pengelolaan dana bantuan, dan pelaporan sederhana, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan mitra CSR. Pendampingan perlu dilanjutkan secara berkala agar wisata edukasi budidaya lele berkembang secara berkelanjutan.

Kata kunci: BUMDes, pengelolaan keuangan, wisata edukasi, budidaya lele, CSR

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in driving the village economy, but their sustainability depends heavily on orderly and accountable financial management. BUMDes MAMA in Pedagangan Village, Dukuhwaru District, Tegal Regency, operates a Catfish Farming Educational Tourism business unit supported by a Corporate Social Responsibility (CSR) grant allocation from Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) SCTV-Indosiar. This community service activity aimed to assist the managers in managing the finances of the business unit. The method was participatory mentoring, consisting of observation and coordination, discussions and simple bookkeeping practice with the management, a monitoring visit to the farming site, and documentation of activities. The activity provided a foundation for the management to apply financial separation, transaction recording, management of grant funds, and simple reporting, while also strengthening synergy among the university, the village government, and the CSR partner. Mentoring should be continued regularly so that the catfish farming educational tourism develops sustainably.

Keywords*: bumdes, financial management, educational tourism, catfish farming, corporate social responsibility*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi ekonomi desa demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam mengembangkan usaha ekonomi desa, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menempatkan BUM Desa sebagai badan hukum yang mengelola usaha, memanfaatkan aset, serta mengembangkan investasi dan produktivitas desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Dengan

kedudukan sebagai badan hukum tersebut, BUMDes diharapkan tidak hanya menjadi penyedia layanan dan pelaku usaha, tetapi juga penyumbang pendapatan asli desa dan pengungkit kemandirian ekonomi masyarakat desa (Monoarfa et al., 2023).

Peran strategis tersebut belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Data yang dihimpun Monoarfa et al. (2023) dari pemberitaan nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 57.273 BUMDes, dengan 45.233 unit (79%) berstatus aktif dan 12.040 unit (21%) tidak aktif, sedangkan 15.768 BUMDes aktif (35%) terdampak pandemi (Tabel 1). Angka ini memperlihatkan bahwa banyaknya BUMDes yang berdiri tidak otomatis berarti kinerja usaha yang baik, sehingga penguatan kapasitas pengelolaan menjadi agenda yang mendesak. Monoarfa et al. (2023) juga menegaskan bahwa revitalisasi BUMDes memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat atau mitra pembangunan, akademisi, pelaku usaha, dan media. Gagasan kolaboratif inilah yang menjadi dasar kegiatan pengabdian ini, yang mempertemukan perguruan tinggi, pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan mitra CSR.

Tabel 1. Kondisi BUMDes di Indonesia tahun 2021

Indikator	Jumlah
Jumlah BUMDes (2021)	57.273
BUMDes aktif	45.233 (79%)
BUMDes tidak aktif	12.040 (21%)
BUMDes aktif yang terdampak pandemi	15.768 (35% dari yang aktif)
Omzet BUMDes aktif	Rp4,6 triliun

Sumber: Monoarfa et al. (2023), yang mengutip pemberitaan Kontan (2022).

Salah satu penyebab belum optimalnya kinerja BUMDes adalah lemahnya tata kelola keuangan yang berakar pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola. Kegiatan pengabdian di berbagai daerah menemukan pola yang serupa. Marsono et al. (2023) mendapati bahwa pengelola BUMDes di Desa Sukaraharja, Cianjur, baru mencatat penerimaan dan pengeluaran sehingga kinerja usaha yang sebenarnya belum dapat disajikan. Ubaidillah (2025) menemukan di Desa Kara, Sampang, bahwa pengelola belum memiliki pengetahuan akuntansi untuk menyusun laporan keuangan dan belum mampu menghitung harga pokok produksi dengan tepat. Wardana et al. (2022) melaporkan bahwa pencatatan keuangan BUMDes Retno Sembodo masih manual dan transparansi data keuangannya kurang, sedangkan Rizky et al. (2024) mendapati BUMDes Gampong Siem di Aceh Besar masih memakai sistem pencatatan tradisional. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan pendampingan keuangan bukan kasus tunggal, melainkan persoalan umum BUMDes, sehingga kegiatan pengabdian yang menyasar tata kelola keuangan memiliki urgensi yang kuat.

Salah satu potensi usaha yang dapat dikembangkan desa adalah budidaya ikan lele yang dipadukan dengan konsep wisata edukasi. Di Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, BUMDes MAMA mengelola Wisata Edukasi Budidaya Lele yang memanfaatkan kolam-kolam budidaya sebagai sarana belajar sekaligus usaha yang diharapkan menjadi sumber pendapatan desa. Pengembangan usaha ini memperoleh dukungan melalui alokasi proposal bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) SCTV-Indosiar kepada BUMDes MAMA Desa Pedagangan. Dukungan tersebut membuka peluang pengembangan unit usaha, tetapi sekaligus menambah tanggung jawab pengurus, karena dana bantuan harus dikelola dan dipertanggungjawabkan secara tertib kepada pemerintah desa dan mitra pemberi bantuan.

Konsep wisata edukasi memadukan unsur pendidikan, wisata, dan pemberdayaan masyarakat, dan apabila dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat berupa pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah (Putra et al., 2024). Meski demikian, pengalaman pendampingan pada BUMDes yang mengembangkan desa edu wisata menunjukkan bahwa pengelola masih kurang memahami cara mengelola dan mengembangkan usahanya (Putra et al., 2024). Anom et al. (2024) mendampingi BUMDes Karya Mulya yang mengelola wisata edukasi gerabah di Desa Rendeng, Bojonegoro, dan menemukan kendala pada manajemen persediaan serta jangkauan pemasaran. Pelatihan manajemen usaha dan pendampingan pencatatan keuangan dalam kegiatan tersebut membuat pelaku usaha mulai menerapkan pembukuan sederhana, merencanakan modal dengan lebih baik, dan mengendalikan biaya produksi, sementara pengelola wisata mulai menyusun paket kunjungan yang lebih terstruktur.

Pengabdian pada BUMDes yang mengelola budidaya lele juga telah dilakukan oleh pengabdi lain. Kusumawati et al. (2021) mendampingi BUMDes budidaya lele Al-Barokah di Desa Patean, Sumenep, dan menghasilkan peluang usaha olahan lele bagi kelompok PKK, laporan keuangan

BUMDes yang disusun secara digital, serta inovasi pengelolaan unit usaha. Natalia et al. (2021) mendampingi pembenihan lele bersama BUMDes Sampora, Tangerang Selatan, dan mencatat bahwa biaya awal yang direncanakan sebesar Rp7.766.000 membengkak menjadi Rp8.149.500 akibat kebutuhan yang tidak terduga, termasuk gangguan hama, sehingga estimasi biaya perlu memperhitungkan kenaikan harga dan kejadian di luar rencana. Adapun Ubaidillah (2025) mendampingi BUMDes yang mengelola unit usaha budidaya lele bersama jasa fotokopi dan penggilingan padi, dan menegaskan bahwa setiap unit usaha memiliki karakteristik dan struktur biaya yang berbeda sehingga memerlukan pencatatan dan pelaporan yang sesuai.

Dari sisi metode, pendampingan keuangan BUMDes umumnya dilakukan melalui kombinasi sosialisasi, pelatihan, praktik langsung, dan pendampingan lanjutan. Monoarfa et al. (2023) di BUMDes Tunas Harapan, Boalemo, memulai dengan survei dan wawancara, dilanjutkan seminar dan pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, dan mencatat harapan kepala desa serta pengurus agar pendampingan berlanjut. Marsono et al. (2023) melaksanakan pendampingan bertahap, mulai dari identifikasi kebutuhan, survei lokasi, pelatihan akuntansi dasar, praktik penjurnalan, hingga konsultasi daring, sampai BUMDes mampu menyusun laporan keuangan tahun 2021 sesuai standar yang berlaku. Wardana et al. (2022) membagi kegiatan menjadi tahap pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan dengan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan mitra, sedangkan Iskandar et al. (2024) memadukan edukasi, simulasi, dan pendampingan dengan luaran berupa panduan dan infografis bagi pengelola BUM Desa Ranca Buaya. Rizky et al. (2024) menerapkan pembelajaran partisipatif dan menyarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara rutin.

Kajian tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pengabdian yang telah ada umumnya menyorot BUMDes secara umum, unit produksi, atau pemasaran. Di antara kegiatan yang ditelaah dalam artikel ini, pendampingan pengelolaan keuangan pada unit wisata edukasi budidaya lele yang menerima bantuan CSR belum banyak dijumpai. Kasus BUMDes MAMA memiliki kekhasan pada tiga hal. Pertama, unit usahanya memadukan fungsi produksi lele dan layanan edukasi sehingga arus penerimaan dan pengeluarannya perlu dipisahkan agar kinerjanya terukur. Kedua, dana bantuan CSR peruntukannya terikat pada alokasi dalam proposal sehingga penggunaannya harus dicatat tersendiri. Ketiga, pengurus perlu melaporkan hasil pengelolaan kepada lebih dari satu pihak, yaitu pengurus, pemerintah desa, dan mitra pemberi bantuan.

Untuk usaha berskala mikro dan kecil, pencatatan keuangan dapat mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang dirancang lebih sederhana untuk diterapkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Ubaidillah (2025) mengingatkan bahwa PP Nomor 11 Tahun 2021 mewajibkan BUMDes menyusun laporan keuangan secara berkala, baik semesteran maupun tahunan. Monoarfa et al. (2023) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang sesuai standar berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan sekaligus sebagai sarana membuka kepercayaan dan kemitraan, dan Rizky et al. (2024) menegaskan bahwa laporan yang terstruktur memungkinkan BUMDes mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemisahan keuangan unit usaha, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta penyusunan laporan menjadi dasar bagi pengurus dalam mengambil keputusan sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas dukungan CSR yang diterima.

Perguruan tinggi memiliki peran melalui pengabdian kepada masyarakat untuk mendampingi mitra agar berdaya. Pemberdayaan menekankan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri (Suharto, 2005; Mardikanto & Soebiato, 2012), dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dicatat oleh Rizky et al. (2024) sebagai salah satu faktor pendorong keberhasilan pengelolaan keuangan BUMDes. Atas dasar itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh dosen Universitas Islam Bakti Negara Tegal dan Universitas Pancasakti Tegal. Tujuan kegiatan ini adalah mendampingi pengelolaan keuangan Wisata Edukasi Budidaya Lele BUMDes MAMA Desa Pedagangan, yang mencakup pemisahan keuangan, pencatatan transaksi, pengelolaan dana bantuan, dan pelaporan sederhana, serta mendokumentasikan dukungan CSR dan kunjungan monitoring ke lokasi.

METODE

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan pendampingan partisipatif, yaitu tim pengabdi bekerja bersama pengurus BUMDes MAMA sebagai mitra sehingga pengelola terlibat aktif dalam setiap tahap

Vol. 1, No. 2 Oktober 2026
E-ISSN: 3090-2738

kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena pemberdayaan menekankan penguatan kemampuan mitra untuk mengelola sumber dayanya sendiri, bukan sekadar menerima bantuan (Suharto, 2005; Mardikanto & Soebiato, 2012), dan karena pembelajaran partisipatif yang melibatkan pendidik dan peserta secara aktif telah dipakai pada pendampingan keuangan BUMDes lain (Rizky et al., 2024). Lokasi kegiatan adalah Wisata Edukasi Budidaya Lele BUMDes MAMA, Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan sasaran pengurus dan pengelola unit usaha wisata edukasi tersebut. Tim pengabdi terdiri atas dosen Universitas Islam Bakti Negara Tegal dan Universitas Pancasakti Tegal, dengan dukungan pemerintah desa dan mitra CSR YPP SCTV-Indosiar.

Tahapan kegiatan disusun mengikuti alur yang lazim pada pendampingan BUMDes, yaitu identifikasi kebutuhan, pendampingan, dan tindak lanjut (Marsono et al., 2023; Wardana et al., 2022), dan diringkas pada Gambar 1. Tahap pertama adalah observasi dan koordinasi awal, yaitu peninjauan lokasi kolam budidaya serta diskusi dengan pengurus mengenai kondisi usaha dan alokasi bantuan CSR. Tahap kedua adalah pendampingan pengelolaan keuangan melalui diskusi dan praktik pencatatan sederhana, yang mencakup pemisahan keuangan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran beserta penyimpanan bukti, pengelolaan dana bantuan sesuai alokasi dalam proposal, dan pelaporan sederhana yang mengacu pada SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Seperti pada kegiatan Ubaidillah (2025) yang membekali pengelola dengan pembukuan manual sebelum beralih ke aplikasi, praktik pencatatan dimulai dari bentuk yang paling sederhana agar dapat diikuti pengelola dengan latar belakang yang beragam. Tahap ketiga adalah kunjungan dan monitoring ke lokasi wisata edukasi, termasuk kunjungan dosen Universitas Pancasakti Tegal, dan tahap keempat adalah dokumentasi serta refleksi hasil kegiatan bersama mitra.

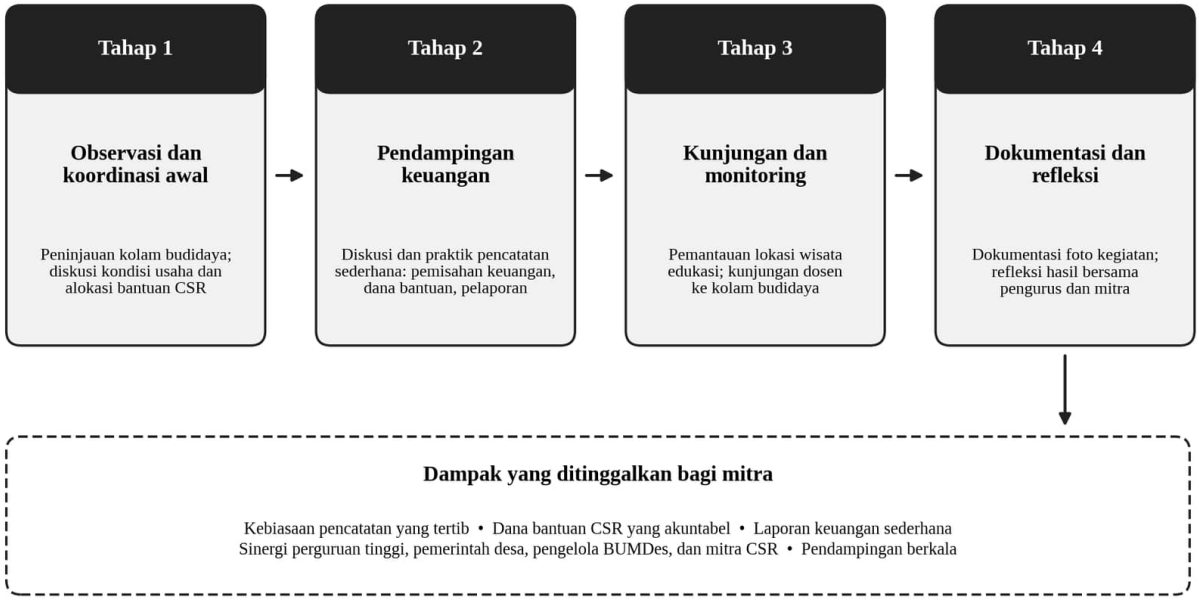

Gambar 1. Alur metode pendampingan pengelolaan keuangan Wisata Edukasi Budidaya Lele BUMDes MAMA

Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi, diskusi, dan dokumentasi foto, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses dan capaian pendampingan. Capaian dibaca melalui lima aspek pendampingan, yaitu pemisahan keuangan, pencatatan transaksi, pengelolaan dana bantuan, pelaporan, dan akuntabilitas, yang dirangkum pada Tabel 2. Berbeda dengan kegiatan yang memakai pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan mitra (Wardana et al., 2022), pengukuran kuantitatif belum digunakan dalam kegiatan ini dan dicatat sebagai bahan perbaikan pada kegiatan berikutnya.

Metode yang dijabarkan di atas diharapkan meninggalkan tiga dampak bagi masyarakat. Pertama, bagi pengurus dan pengelola, pendampingan partisipatif meninggalkan kebiasaan dan format pencatatan sederhana yang dapat dilanjutkan secara mandiri, sehingga pengurus dapat merencanakan modal dan mengendalikan biaya (Anom et al., 2024) serta menggunakan laporan keuangan untuk menilai keberlanjutan dan profitabilitas unit usaha (Ubaidillah, 2025). Kedua, bagi pemerintah desa dan mitra

CSR, laporan sederhana yang tertib menjadi bentuk pertanggungjawaban dana bantuan dan dasar kepercayaan untuk kemitraan lebih lanjut (Monoarfa et al., 2023; Rizky et al., 2024). Ketiga, bagi masyarakat sekitar, wisata edukasi yang dikelola secara akuntabel berpeluang bertahan sebagai sumber belajar dan sumber pendapatan desa (Putra et al., 2024), dan pengalaman ini dapat menjadi rujukan bagi BUMDes lain. Agar dampak tersebut bertahan, pendampingan perlu dilanjutkan secara berkala karena konsistensi pencatatan merupakan tantangan yang perlu dijaga (Rizky et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Wisata Edukasi Budidaya Lele BUMDes MAMA

Wisata Edukasi Budidaya Lele merupakan unit usaha BUMDes MAMA yang berlokasi di Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Lokasi ini ditandai dengan papan nama Wisata Edukasi Budidaya Lele yang mencantumkan kerja sama YPP dan BUMDes MAMA Pedagangan (Gambar 2). Area budidaya terdiri atas banyak kolam terpal berbentuk bundar dengan beragam warna yang tertata di lahan terbuka di sekitar area persawahan (Gambar 3).

Gambar 2. Papan nama Wisata Edukasi Budidaya Lele YPP dan BUMDes MAMA Pedagangan

Gambar 3. Area kolam budidaya lele di lokasi wisata edukasi

Konsep wisata edukasi memungkinkan kolam budidaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi, tetapi juga sebagai media belajar bagi pengunjung mengenai budidaya lele. Karena itu, pengelolaan keuangan menjadi penting agar kegiatan produksi dan layanan wisata dapat dipantau secara terpisah dan terukur.

Pendampingan Pengelolaan Keuangan

Pendampingan dilakukan melalui diskusi bersama pengurus dan pengelola di ruang pertemuan (Gambar 4). Dalam diskusi tersebut, tim mengajak pengurus menelaah kebutuhan pencatatan keuangan unit usaha dan menyepakati langkah-langkah yang dapat diterapkan secara bertahap. Aspek pendampingan dirangkum pada Tabel 2.

Vol. 1, No. 2 Oktober 2026
E-ISSN: 3090-2738

Gambar 4. Diskusi dan pendampingan pengelolaan keuangan

Tabel 2. Aspek pendampingan pengelolaan keuangan

Aspek	Bentuk pendampingan
Pemisahan keuangan	Memisahkan keuangan unit usaha wisata edukasi dari keuangan pribadi dan unit usaha lain
Pencatatan transaksi	Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran unit usaha secara tertib dan menyimpan bukti transaksi
Pengelolaan dana bantuan	Mencatat penggunaan dana bantuan CSR sesuai dengan alokasi dalam proposal
Pelaporan	Menyusun laporan keuangan sederhana secara berkala dengan mengacu pada SAK EMKM
Akuntabilitas	Menyampaikan laporan kepada pengurus, pemerintah desa, dan mitra pemberi bantuan

Pendampingan menekankan prinsip sederhana, yaitu setiap transaksi dicatat, bukti disimpan, dan laporan disusun secara berkala. Pendekatan ini sejalan dengan semangat SAK EMKM yang menyediakan pedoman pencatatan lebih sederhana bagi entitas mikro, kecil, dan menengah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Dengan pencatatan yang tertib, pengurus dapat mengetahui kinerja keuangan unit usaha wisata edukasi dan mengambil keputusan secara lebih terukur.

Dukungan CSR dan Kunjungan Monitoring

Pengembangan wisata edukasi ini didukung oleh alokasi bantuan CSR YPP SCTV-Indosiar kepada BUMDes MAMA Desa Pedagangan. Dukungan tersebut terdokumentasi pada prosesi di kolam budidaya yang dihadiri sejumlah tokoh dan unsur masyarakat (Gambar 5). Selain itu, dilakukan kunjungan ke lokasi untuk melihat langsung kondisi kolam dan kegiatan budidaya (Gambar 6 dan Gambar 7), termasuk kunjungan dosen Universitas Pancasakti Tegal ke lokasi wisata edukasi (Gambar 8).

Vol. 1, No. 2 Oktober 2026
E-ISSN: 3090-2738

Gambar 6. Peninjauan kolam budidaya lele

Gambar 7. Kunjungan tim ke area kolam budidaya

Gambar 5. Prosesi pada kolam budidaya dalam rangkaian dukungan CSR YPP SCTV-Indosiar

Gambar 8. Kunjungan dosen ke lokasi kolam budidaya

Pembahasan

Kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan merupakan fondasi keberlanjutan unit usaha desa. Dukungan CSR yang diterima BUMDes MAMA akan memberikan manfaat jangka panjang apabila dikelola dengan pencatatan dan pelaporan yang akuntabel. Pandangan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan, yaitu penguatan kapasitas mitra agar mampu mengelola sumber dayanya sendiri, bukan sekadar menerima bantuan (Suharto, 2005; Mardikanto & Soebiato, 2012). Dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUM Desa dituntut mengelola usaha dan asetnya secara produktif (Pemerintah Republik Indonesia, 2021), sehingga kemampuan pengurus dalam mengelola keuangan menjadi syarat penting.

Kegiatan ini juga memperlihatkan sinergi tiga pihak, yaitu perguruan tinggi yang mendampingi, BUMDes dan pemerintah desa sebagai pengelola, serta mitra CSR sebagai pemberi dukungan. Tantangan yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsistensi pencatatan harian dan peningkatan kapasitas pengurus, sehingga pendampingan perlu dilanjutkan secara berkala.

SIMPULAN

Pendampingan pengelolaan keuangan pada Wisata Edukasi Budidaya Lele BUMDes MAMA Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, memberikan landasan bagi pengurus untuk menerapkan pemisahan keuangan, pencatatan transaksi, pengelolaan dana bantuan, dan pelaporan sederhana, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa dan pengelola BUMDes, serta mitra CSR YPP SCTV-Indosiar. Pendekatan partisipatif yang dijalankan melalui observasi dan koordinasi, pendampingan pencatatan, kunjungan monitoring, serta dokumentasi dan

refleksi diharapkan meninggalkan kebiasaan pencatatan yang dapat dilanjutkan pengurus secara mandiri dan menjadi dasar akuntabilitas kepada pemerintah desa dan mitra pemberi bantuan. Agar dampak tersebut berlanjut, disarankan agar pendampingan dilakukan secara berkala, pengurus membiasakan pencatatan harian dan penyusunan laporan bulanan, serta kegiatan berikutnya mengukur capaian pendampingan secara kuantitatif, misalnya melalui evaluasi sebelum dan sesudah pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

Anom, L., Safii, A. A., Rahayu, S., Murtini, & Alifah, F. N. D. (2024). Penerapan inovasi manajemen usaha dan pemasaran digital pada wisata edukasi dan produk gerabah. *Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4*(3), 85–92.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.

Iskandar, Fahmi, A., & Firdiansyah, A. (2024). Pengabdian masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa Ranca Buaya. *Abdimasku, 7*(2), 698–706.

Kusumawati, I. R., Hidayaturrahman, M., & Dani, R. (2021). Peningkatan kesejahteraan ekonomi desa melalui optimalisasi pengelolaan BUMDes budidaya lele di Desa Patean Kecamatan Batuan. *Jurnal Abdimas Indonesia, 1*(2), 80–88.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Marsono, Siswanto, & Suprayitno. (2023). Penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sektor manufaktur. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8*(1), 1–9. https://doi.org/10.30653/jppm.v8i1.230

Monoarfa, R., Noholo, S., & Ahmad, S. H. (2023). Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes di Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi, 2*(2), 89–97. https://doi.org/10.37479/mopolayio.v2i2.60

Natalia, C., Sukwadi, R., Kartawidjaja, M. A., Goenawan, S. I., Uyanto, S. S., Tirtaulima, C. N., & Asmaralda, N. (2021). Pendampingan budidaya ikan lele di Desa Sampora Cisauk. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas, 1*(1), 13–18.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*.

Putra, R. S., Ma'ruf, M., Fatimah, N., Fitriya, A. L., & Muzaki, F. I. (2024). Pengelolaan budaya profesional sebagai penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kragan menuju desa edu wisata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Bakti Kita, 5*(2), 106–114. https://doi.org/10.52166/baktikita.v5i2.7806

Rizky, F., Agustina, Azlina, Lisnawati, Azmy, K., Sari, D. M., & Martunis, L. (2024). Peningkatan pengelolaan keuangan melalui pelatihan dan pendampingan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gampong Siem. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 7*(1), 70–77.

Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Ubaidillah. (2025). Pelatihan peningkatan akuntabilitas BUMDes melalui penyusunan laporan keuangan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5*(2), 78–87.

Wardana, W., Fitrianna, H., & Suhartanto, S. (2022). Scale up business dan digitalisasi tata kelola BUMDes Retno Sembodo dalam membentuk kemandirian ekonomi masyarakat. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 3*(2), 178–189. https://doi.org/10.33394/jpu.v3i2.5692